

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Jumlah kemiskinan (poverty) merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama di berbagai negara. Fenomena ini kerap dipandang sebagai tantangan sosial yang dihadapi oleh setiap negara dalam mengimplementasikan agenda pembangunan yang telah dirancang. Hakikat jumlah kemiskinan tercermin pada ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum, khususnya yang berkaitan dengan konsumsi dan tingkat pendapatan. Jumlah kemiskinan bahkan masih menjadi problematika global yang hingga saat ini dialami oleh hampir seluruh negara di berbagai kawasan dunia. Beragam intervensi kebijakan telah diimplementasikan untuk menanggulangi jumlah kemiskinan, baik dalam cakupan lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Beban yang lebih kompleks umumnya dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan, jumlah kemiskinan masih menjadi salah satu problem fundamental di Indonesia akibat tingginya penduduk miskin yang relatif persisten. Berbagai kebijakan yang diinisiasi pemerintah belum sepenuhnya mampu mengeliminasi persoalan tersebut, meskipun telah dilakukan melalui beragam program seperti bantuan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat, serta kebijakan kesejahteraan lainnya. Permasalahan jumlah kemiskinan bersifat multidimensional karena berkorelasi dengan beragam dimensi kehidupan, meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan dimensi lainnya. Menurut Anindita dan Nurhayati (2024), pemerintah juga berupaya memperluas akses

terhadap layanan dasar serta memperkuat konektivitas antarwilayah sebagai strategi untuk mereduksi konsentrasi wilayah kantong jumlah kemiskinan.

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu indikator fundamental dalam mengestimasi jumlah kemiskinan pada suatu wilayah. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengevaluasi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberhasilan maupun kegagalan suatu proses pembangunan dapat diidentifikasi melalui analisis terhadap dinamika jumlah kemiskinan yang terjadi di wilayah tersebut, karena hal tersebut merefleksikan implikasi dari berbagai kebijakan serta program pembangunan yang telah diimplementasikan.

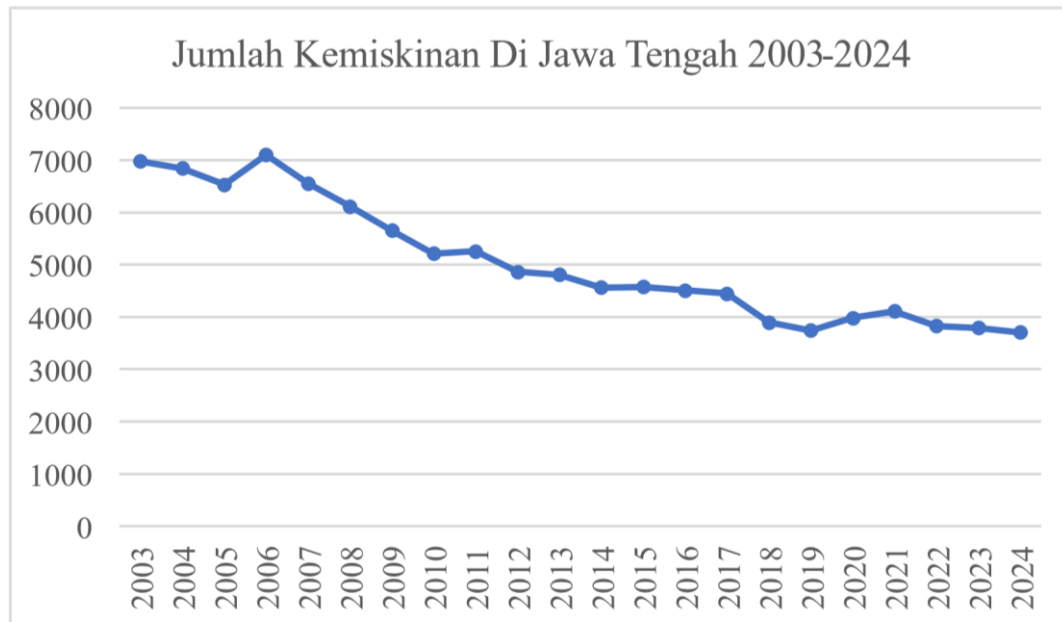
Menurut Rahmadana (2022), kesenjangan yang semakin melebar antara kelompok masyarakat miskin dan kaya di Indonesia dipengaruhi oleh disparitas antarwilayah yang muncul akibat ketimpangan distribusi pendapatan. Kondisi tersebut menjadi salah satu determinan utama dalam permasalahan jumlah kemiskinan di Indonesia. Upaya pengentasan jumlah kemiskinan di suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari berbagai variabel yang saling terintegrasi, seperti jumlah penduduk, tingkat pendidikan masyarakat, serta ketersediaan kesempatan kerja. Selain itu, dimensi kesehatan, tingginya tingkat pengangguran, serta berbagai persoalan sosial dan ekonomi lainnya turut berkontribusi terhadap kondisi jumlah kemiskinan yang dialami masyarakat. Oleh sebab itu, efektivitas pengentasan jumlah kemiskinan memerlukan pendekatan lintas sektor dan lintas aktor yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Jumlah kemiskinan merupakan suatu kondisi ketika individu maupun kelompok masyarakat belum mampu mencapai standar hidup yang layak sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Kondisi tersebut merepresentasikan ketidakmampuan dalam memenuhi berbagai dimensi kehidupan yang bersifat esensial, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan secara komprehensif. Jumlah kemiskinan tidak hanya terbatas pada rendahnya tingkat pendapatan, melainkan juga mencakup keterbatasan dalam memperoleh kebutuhan dasar, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, ketersediaan pangan bergizi, hunian yang layak, pendidikan yang berkualitas, serta sandang yang mencukupi. Selain itu, jumlah kemiskinan juga dapat dimaknai sebagai keterbatasan dalam memperoleh peluang peningkatan taraf hidup, baik melalui akses terhadap pekerjaan yang layak, permodalan usaha, maupun fasilitas sosial yang mendukung kualitas kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, jumlah kemiskinan tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga mencakup berbagai faktor struktural yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara luas Meytriana et al. (2025).

Jawa Tengah terletak di bagian sentral Pulau Jawa dan memiliki posisi geografis yang strategis karena diapit oleh Jawa Barat di sisi barat dan Jawa Timur di sisi timur, serta berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara dan Samudra Hindia di bagian selatan. Karakteristik geografis wilayah ini meliputi dataran tinggi, kawasan pegunungan, hingga dataran rendah yang relatif subur, sehingga sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan berkembang sebagai basis utama perekonomian daerah. Jawa Tengah juga dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa dengan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai

kesopanan, gotong royong, dan tata krama. Kekayaan budaya daerah tercermin melalui keberadaan tradisi batik, wayang, serta gamelan yang tetap lestari hingga saat ini. Struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor pertanian yang berperan sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan. Selain itu, Jawa Tengah merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional terbesar setelah Jawa Timur, dengan komoditas unggulan berupa padi, jagung, dan berbagai hasil hortikultura.

Semarang sebagai ibu kota provinsi berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan aktivitas ekonomi regional. Sementara itu, kota-kota lain seperti Surakarta, Magelang, dan Kudus memiliki kontribusi penting dalam sektor industri, kebudayaan, maupun pariwisata. Secara umum, Jawa Tengah memiliki karakteristik agraris yang kuat, kekayaan budaya yang tinggi, serta peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam konteks jumlah kemiskinan, Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi di Pulau Jawa yang masih menghadapi permasalahan jumlah kemiskinan yang cukup kompleks. Jumlah kemiskinan menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius, baik oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Hingga saat ini, tingkat jumlah kemiskinan di Jawa Tengah masih tergolong tinggi dan menempati posisi kedua tertinggi di Pulau Jawa setelah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menganalisis jumlah kemiskinan tersebut, penelitian ini memanfaatkan data runtun waktu (time series) yang bersumber dari publikasi BPS Jateng.

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)

Sumber : BPS Jawa Tengah

Grafik tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah selama periode 2003–2024. Pada fase awal pengamatan, jumlah kemiskinan masih berada pada kisaran 7.000 ribu jiwa dan mengalami fluktuasi relatif kecil hingga tahun 2007. Memasuki tahun 2008, tren penurunan mulai tampak lebih konsisten, yang ditunjukkan oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin secara gradual hingga mencapai sekitar 4.500 ribu jiwa pada periode 2015–2017. Penurunan cukup signifikan terjadi pada 2018–2020, ketika jumlah kemiskinan turun di bawah 4.000 ribu jiwa. Meskipun sempat meningkat kembali pada 2021, angka jumlah kemiskinan kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya dan stabil di kisaran 3.700–3.800 ribu jiwa hingga tahun 2024. Secara keseluruhan, grafik menggambarkan keberhasilan upaya pengentasan jumlah kemiskinan di Jawa Tengah dalam jangka panjang, dengan tren menurun yang cukup konsisten selama dua dekade terakhir.

Dalam konteks jumlah kemiskinan, Jawa Tengah termasuk sebagai provinsi dengan jumlah kemiskinan yang relatif tinggi di Indonesia. Berdasarkan publikasi BPS Jawa Tengah, jumlah jumlah kemiskinan selama periode 2017–2023 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada Maret 2017, persentase jumlah kemiskinan tercatat sebagai yang tertinggi, yaitu sebesar 13,01%. Selanjutnya, setelah mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, jumlah kemiskinan kembali meningkat pada September 2020 hingga mencapai 11,84%. Meskipun dalam kurun waktu 2021–2024 angka jumlah kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun, jumlah kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang bersifat kompleks meskipun berbagai kebijakan penanggulangan telah diimplementasikan.

Tingginya tingkat pengangguran menjadi salah satu determinan utama peningkatan jumlah kemiskinan karena banyak penduduk usia produktif yang belum mampu memperoleh akses terhadap pekerjaan yang layak. Di sisi lain, peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merefleksikan semakin besarnya jumlah masyarakat yang siap dan bersedia memasuki dunia kerja, namun kenyataannya tidak seluruh tenaga kerja tersebut dapat terserap secara optimal dalam pasar tenaga kerja. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir memang memperlihatkan kecenderungan positif, tetapi peningkatan tersebut belum cukup efektif dalam menurunkan jumlah kemiskinan secara komprehensif. Fenomena ini mengindikasikan bahwa inklusifitas pertumbuhan ekonomi masih belum sepenuhnya terlaksana dan belum mampu menciptakan

kesempatan kerja yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pengentasan jumlah kemiskinan di Jawa Tengah memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perluasan kesempatan kerja serta optimalisasi kualitas sumber daya manusia dan angkatan kerja.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan di Jawa Tengah cenderung terkonsentrasi pada wilayah-wilayah dengan karakteristik tertentu. Daerah dengan persentase penduduk miskin yang tinggi umumnya berdekatan dengan wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa, khususnya di kawasan barat Jawa Tengah. Kondisi tersebut mengindikasikan pentingnya penerapan pendekatan berbasis kewilayahan dalam strategi pengentasan jumlah kemiskinan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jumlah kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan.

Selama empat tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Magelang umumnya berada di bawah rata-rata jumlah kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, kondisi yang berlawanan terjadi pada tahun 2021 ketika jumlah kemiskinan Kabupaten Magelang nilai lebih tinggi dari rata-rata jumlah kemiskinan provinsi dengan besaran perbedaan 0,12%. Pada tahun 2021, di Jawa Tengah jumlah kemiskinan berada pada angka 11,79 persen, sedangkan Kabupaten Magelang mencapai 11,91 persen sebagaimana dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang (2022). Kondisi tersebut turut diperkuat oleh data runtun waktu (time series) yang dipublikasikan oleh BPS Prov. Jawa Tengah selama

periode 2003–2024 mengenai perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

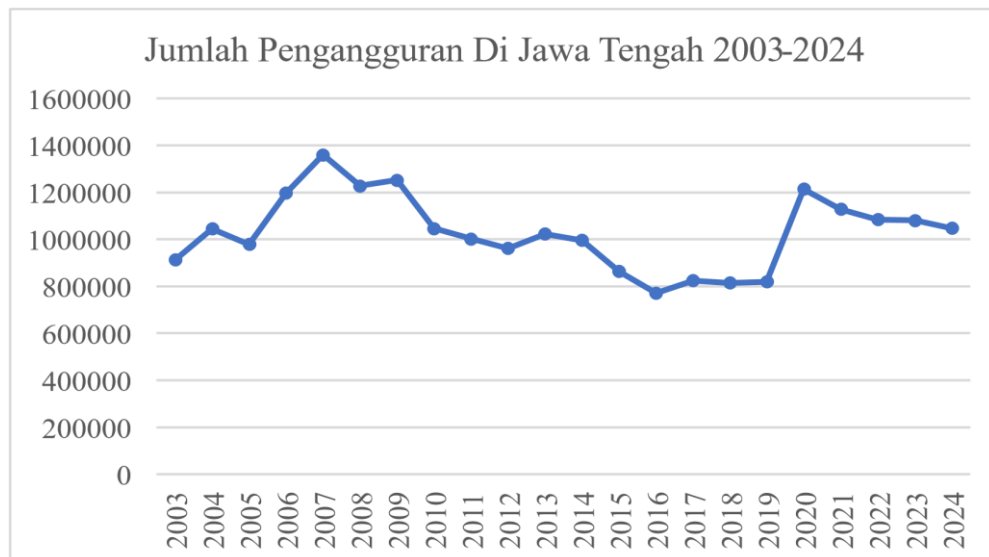
Jumlah kemiskinan dapat dipandang sebagai salah satu parameter fundamental dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi, karena merefleksikan sejauh mana kebijakan dan program pembangunan yang diimplementasikan pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mereduksi ketimpangan sosial, serta menciptakan peluang yang lebih luas bagi kelompok masyarakat kurang mampu untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Jumlah kemiskinan merupakan persoalan yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi permasalahan struktural yang mendasar sehingga berpotensi memengaruhi berbagai indikator sosial dan ekonomi lainnya, seperti tingkat pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), serta laju pertumbuhan ekonomi.

Pengangguran merupakan kondisi individu dalam usia produktif yang belum memperoleh pekerjaan, baik mereka yang sedang mencari pekerjaan, belum pernah bekerja, maupun individu yang sebelumnya pernah bekerja tetapi saat ini berada dalam status tidak bekerja. Kelompok ini juga mencakup masyarakat yang sedang mempersiapkan usaha, tidak aktif mencari pekerjaan akibat terbatasnya kesempatan kerja, serta individu yang telah memperoleh pekerjaan namun belum mulai bekerja. Fenomena pengangguran berpotensi meningkatkan jumlah kemiskinan sehingga menjadi persoalan krusial di berbagai wilayah, termasuk di Jawa Tengah. Pada Agustus 2023, jumlah pengangguran di Jawa Tengah tercatat mencapai 1.084.475

jiwa. Selain itu, Brebes, Cilacap, dan Semarang merupakan wilayah dengan persentase pengangguran tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu faktor utama penyebab pengangguran adalah peningkatan jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan ekspansi kesempatan kerja secara proporsional, sehingga banyak angkatan kerja yang belum mampu terserap ke dalam pasar tenaga kerja (Rahayu & Haryatiningsi, 2024). Kondisi tersebut menimbulkan tekanan terhadap pasar kerja dan pada akhirnya mendorong peningkatan tingkat pengangguran.

Gambar 1.2 Jumlah Pengangguran (Juta Orang)



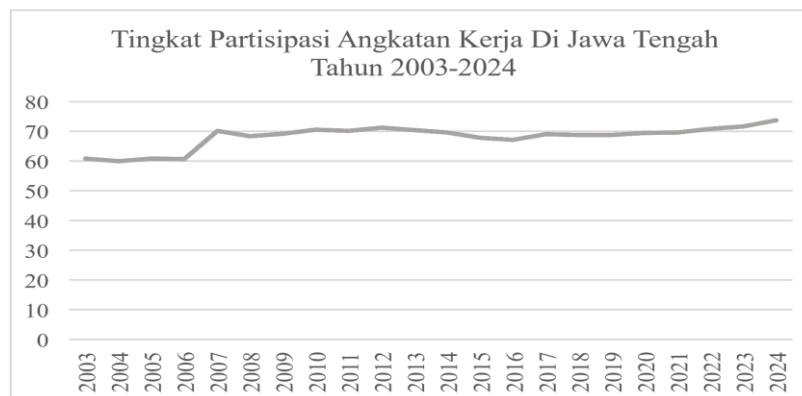
Sumber: BPS Jawa Tengah (2003-2024)

Jumlah pengangguran di Jawa Tengah menunjukkan dinamika yang relatif fluktuatif selama periode pengamatan. Pada awal tahun 2003, jumlah pengangguran berada pada kisaran 900 ribu jiwa dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya sekitar tahun 2007 dengan jumlah mendekati 1,35 juta jiwa. Setelah periode tersebut, tingkat pengangguran mulai mengalami penurunan secara gradual hingga tahun 2015 dan mencapai titik terendah pada kisaran 780 ribu jiwa. Memasuki tahun 2020, jumlah pengangguran kembali mengalami peningkatan

yang cukup tajam hingga mencapai sekitar 1,2 juta jiwa. Kondisi ini dapat diasosiasikan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan sektor ketenagakerjaan. Selanjutnya, pada periode 2021–2024, tingkat pengangguran cenderung berada dalam kondisi yang relatif stabil pada kisaran 1,05–1,1 juta jiwa. Secara umum, data tersebut merefleksikan dinamika kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ekonomi, sosial, maupun kebijakan pembangunan daerah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mengindikasikan proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan (Ayuningtyas & Islami, 2022). TPAK dihitung berdasarkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap total penduduk berusia 15 tahun ke atas. TPAK memiliki keterkaitan dengan jumlah kemiskinan karena semakin tinggi partisipasi angkatan kerja, maka semakin besar peluang masyarakat untuk memperoleh pendapatan dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, baik yang disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja, pendidikan, maupun keterampilan, berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran dan memperburuk kondisi jumlah kemiskinan. Meskipun demikian, hubungan antara TPAK dan jumlah kemiskinan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kualitas pekerjaan yang tersedia, tingkat upah yang diterima pekerja, serta kebijakan sosial dan ekonomi yang diterapkan pada suatu wilayah. Di Jawa Tengah, beberapa faktor yang memengaruhi TPAK antara lain tingkat pengangguran, tingkat pendidikan masyarakat, dan kebijakan upah minimum.

Tingginya tingkat pengangguran berpotensi menurunkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sedangkan tingkat pendidikan yang lebih baik serta kebijakan upah minimum yang memadai cenderung mampu meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja turut memberikan kontribusi terhadap dinamika TPAK. TPAK di Jawa Tengah menjadi salah satu keunggulan daerah yang didukung oleh besarnya jumlah penduduk usia produktif serta kuatnya budaya kerja masyarakat yang dikenal disiplin dan produktif. Akses terhadap kesempatan kerja juga relatif tersebar pada berbagai sektor ekonomi, khususnya sektor padat karya seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, sehingga mendorong tingginya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Di samping itu, keberadaan pusat pendidikan, pelatihan vokasional, serta perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup pesat turut meningkatkan kualitas dan kesiapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Kombinasi berbagai faktor tersebut menjadikan TPAK Jawa Tengah relatif stabil dan kompetitif sehingga menempatkannya sebagai salah satu provinsi dengan daya saing tenaga kerja yang cukup tinggi di tingkat nasional. Peningkatan TPAK di Jawa Tengah mencerminkan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memperluas partisipasi tenaga kerja, yang pada akhirnya diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan jumlah kemiskinan di wilayah tersebut. Selain itu, sektor pertanian tetap menjadi salah satu keunggulan utama Jawa Tengah karena memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Gambar 1.3 Jumlah TPAK JATENG (Persen/%)

Sumber: BPS Jawa Tengah (2003-2024)

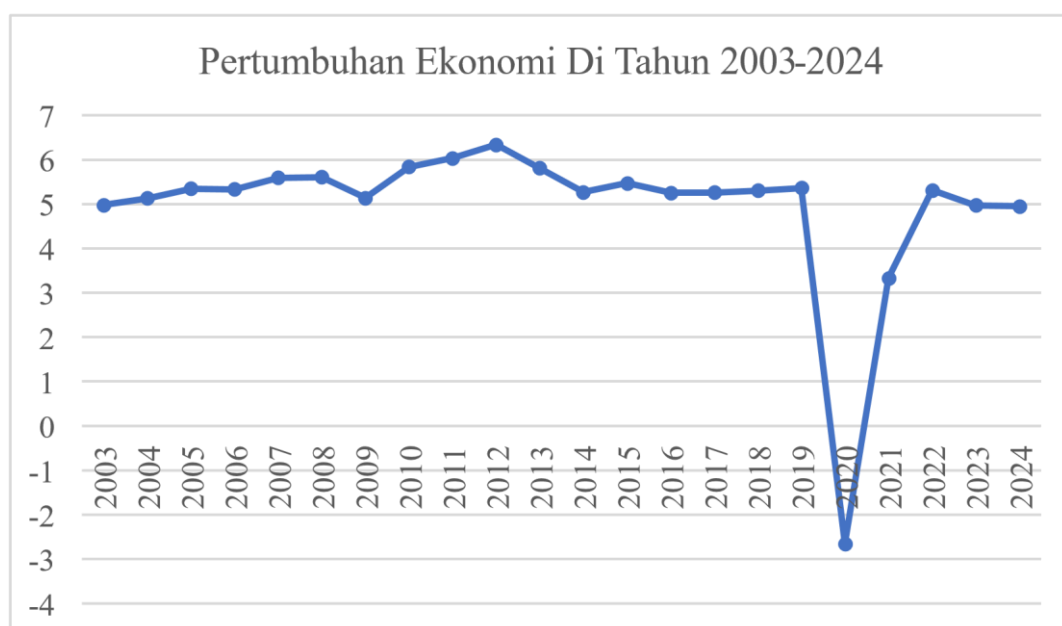
Berdasarkan grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Tengah tahun 2003–2024, terlihat bahwa persentase partisipasi tenaga kerja mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren kenaikan secara keseluruhan. Pada awal periode tahun 2003–2006, TPAK berada di kisaran 60 persen. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2007, ketika TPAK melonjak mendekati angka 70 persen. Setelah itu, selama periode 2008–2014, tingkat partisipasi cenderung stabil pada kisaran 68–71 persen. Memasuki tahun 2015–2017, terjadi sedikit penurunan hingga berada di kisaran 67 persen sebelum kembali menunjukkan peningkatan secara perlahan. Mulai tahun 2018 hingga 2024, TPAK kembali bergerak naik, mencapai sekitar 74 persen pada tahun 2024. Secara keseluruhan, grafik tersebut menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat usia kerja di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dalam jangka panjang, yang mencerminkan semakin aktifnya angkatan kerja dalam kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan proses perkembangan aktivitas perekonomian yang menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat kemakmuran masyarakat. Permasalahan pertumbuhan ekonomi umumnya dipandang sebagai isu

makroekonomi jangka panjang karena berkaitan dengan perkembangan kapasitas produksi suatu perekonomian. Peningkatan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai konsekuensi dari bertambahnya faktor-faktor produksi pada kenyataannya tidak selalu diikuti oleh peningkatan output aktual dalam proporsi yang sama. Dalam banyak kondisi, potensi produksi tumbuh lebih besar dibandingkan realisasi produksi yang sesungguhnya sehingga laju perkembangan ekonomi cenderung lebih lambat dibandingkan potensi yang dimiliki Sukirno dalam Audia et al. (2018).

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang positif seharusnya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong produktivitas pada sektor-sektor unggulan yang pada akhirnya dapat menurunkan jumlah kemiskinan (Hanifah & Hanifah 2021). Akan tetapi, di Jawa Tengah, meskipun pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang positif, penurunan jumlah kemiskinan belum terjadi secara merata di seluruh wilayah.

Gambar 1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)



Sumber: BPS Jawa Tengah (2003-2024)

Grafik tersebut merefleksikan dinamika laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah selama periode 2003–2024. Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kondisi yang relatif stabil pada kisaran 5–6 persen hingga tahun 2019. Dalam periode tersebut, meskipun terjadi beberapa fluktuasi, laju pertumbuhan ekonomi tetap berada pada kategori positif dan cukup kuat. Tingkat pertumbuhan tertinggi tercatat sekitar tahun 2012–2013 dengan nilai mendekati 6,5 persen. Namun demikian, pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi yang cukup signifikan hingga mencapai sekitar –2,5 persen. Kondisi ini merepresentasikan dampak besar pandemi COVID-19 terhadap aktivitas perekonomian. Selanjutnya, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mulai mengalami pemulihan dengan peningkatan pada kisaran 3 persen, kemudian kembali bergerak stabil pada level sekitar 5 persen selama periode 2022–2024. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan yang drastis, perekonomian Jawa Tengah berhasil kembali pada tren pertumbuhan yang positif.

Meskipun demikian, hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat, terutama pada wilayah pedesaan dan kantong-kantong jumlah kemiskinan seperti Brebes, Rembang, dan Blora. Ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta dominasi sektor informal menjadi faktor penghambat utama dalam menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan proses pengentasan jumlah kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah tidak hanya perlu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan berkeadilan sosial sehingga

mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan jumlah kemiskinan di Jawa Tengah.

Dalam kerangka kesejahteraan salah satu indikator yang memicu kemiskinan adalah kurangnya akses atas pangan, salah satunya disebabkan rendahnya *supply* atas pangan. Hal ini berimplikasi pada tingginya harga pangan sehingga masyarakat perlu mengeluarkan uang jauh lebih banyak sehingga porsi pendapatan untuk pangan menjadi lebih tinggi. Tentu saja hal ini memperparah kemiskinan (Suparmono, dkk. 2026). Lebih dalam, hal ini berkaitan dengan daya beli masyarakat, sehingga taraf kemiskinan secara nominal harus dinaikkan.

Jawa Tengah menempati peringkat kedua sebagai daerah dengan produksi padi terbesar di Indonesia pada periode Januari–September 2018, berada tepat di bawah Jawa Timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas produksi pangan Jawa Tengah memiliki kontribusi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Selain komoditas padi, provinsi ini juga menghasilkan berbagai komoditas pangan lainnya, seperti jagung, ubi kayu, kacang tanah, kedelai, serta kacang hijau.

Tingginya tingkat produksi berbagai komoditas tersebut menjadi indikator kuantitatif bahwa Jawa Tengah memiliki tingkat ketersediaan pangan yang relatif melimpah. Oleh karena itu, ketahanan pangan di wilayah ini tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Berikut merupakan skor indeks ketahanan pangan Jawa Tengah selama periode 2020–2023.

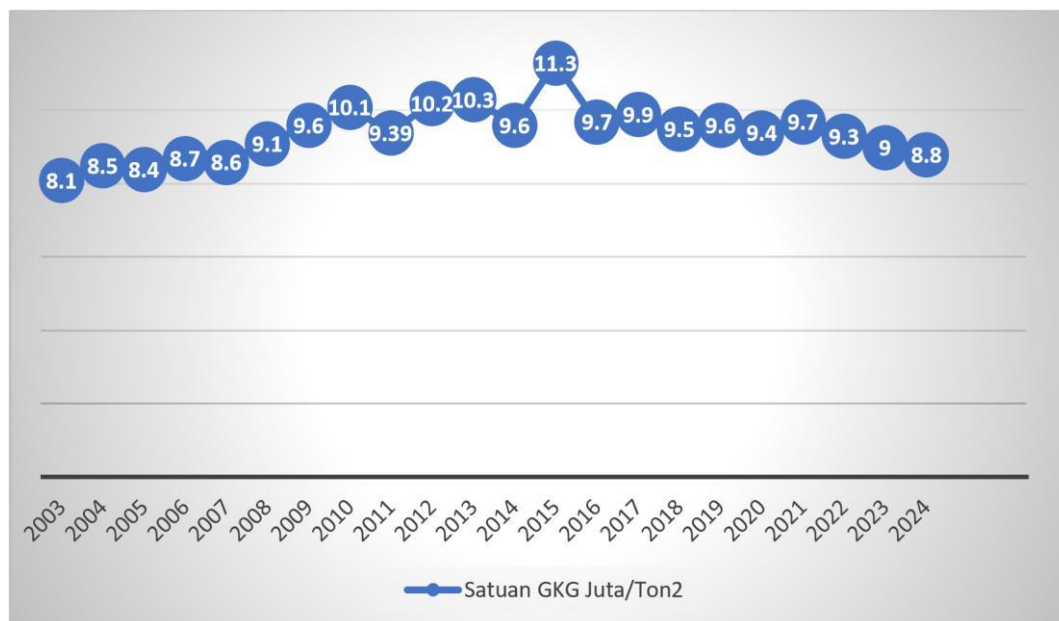
Gambar 1.5 Indeks Ketahanan Pangan

No	Nama Provinsi	IKP 2019	Peringkat 2019	IKP 2020	Peringkat 2020	IKP 2021	Peringkat 2021	IKP 2022	Peringkat 2022	IKP 2023	Peringkat 2023
1	ACEH	66,22	23	70,92	24	71,63	24	70,16	23	72,96	22
2	SUMATERA UTARA	69,81	16	71,84	21	72,25	23	71,22	20	75,97	16
3	SUMATERA BARAT	75,43	9	76,64	8	79,55	8	79,45	8	83,22	5
4	RIAU	62,37	25	64,12	29	66,84	29	67,59	29	68,68	29
5	JAMBI	68,23	19	70,00	26	74,18	19	69,5	26	72,17	25
6	SUMATERA SELATAN	69,30	17	68,67	27	69,55	27	69,64	25	73,82	20
7	BENGKULU	61,78	26	70,28	25	70,32	26	67,99	28	72,27	23
8	LAMPUNG	71,36	15	77,43	12	77,96	11	78,61	9	81,56	10
9	KEP. BANGKA BELITUNG	56,03	29	71,21	22	73,22	21	71,71	19	71,14	27
10	KEPULAUAN RIAU	59,26	28	62,70	31	63,26	30	63,83	30	65,1	30
11	DKI JAKARTA	66,87	21	77,97	10	78,01	10	78,25	10	83,8	3
12	JAWA BARAT	76,44	8	76,76	14	77,79	12	77,55	12	82,19	8
13	JAWA TENGAH	78,85	4	82,31	2	82,73	2	82,95	2	84,8	2
14	DI YOGYAKARTA	83,63	2	80,67	4	81,43	3	80,88	5	83,17	6
15	JAWA TIMUR	73,71	12	79,90	7	79,7	7	79,85	7	82,46	7
16	BANTEN	74,47	11	73,48	18	74,38	18	73,78	18	78,71	13
17	BAJU	85,15	1	84,54	1	83,82	1	85,19	1	87,65	1
18	NUSA TENGGARA BARAT	62,43	24	75,60	16	75,67	16	76,58	13	76,51	15
19	NUSA TENGGARA TIMUR	50,69	32	66,92	28	67,35	28	68,42	27	71,25	26
20	KALIMANTAN BARAT	55,17	30	71,13	23	71,32	25	70,81	22	72,2	24
21	KALIMANTAN TENGAH	71,57	14	72,58	19	73,68	20	69,96	24	68,9	28
22	KALIMANTAN SELATAN	74,71	10	80,04	6	80,29	6	81,05	4	81,26	11
23	KALIMANTAN TIMUR	76,90	7	78,24	9	77,46	13	77,65	11	72,29	12
24	KALIMANTAN UTARA	73,12	13	71,90	20	73,02	22	71,04	21	74,59	19
25	SULAWESI UTARA	81,44	3	77,79	11	78,3	9	74,3	16	77,32	14
26	SULAWESI TENGAH	68,17	20	75,10	17	75,73	15	75,92	14	75,83	17
27	SULAWESI SELATAN	78,69	5	81,81	3	80,82	4	81,36	3	83,36	4
28	SULAWESI TENGGARA	76,99	6	77,06	13	76,64	14	75,04	15	74,96	18
29	GORONTALO	69,06	18	80,40	5	80,52	5	80,35	6	81,63	9
30	SULAWESI BARAT	60,37	27	76,36	15	75,49	17	74,04	17	73,03	21
31	MALUKU	52,35	31	58,15	32	58,7	32	60,2	31	64,37	31
32	MALUKU UTARA	66,58	22	63,12	30	59,58	31	58,39	32	62,34	32
33	PAPUA BARAT	30,12	33	49,40	33	46,05	33	45,92	33	47,95	33
34	PAPUA	25,13	34	34,79	34	35,48	34	37,8	34	42,27	34

Sumber : Badan Pangan Nasional, 2023

Dalam konteks Jawa Tengah, peran sebagai lumbung pangan nasional semakin diperkuat dengan posisi produksinya yang konsisten berada di tiga besar secara nasional. Lumbung pangan sendiri merujuk pada peran suatu daerah sebagai penghasil utama komoditas pangan pokok, terutama padi, yang tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan masyarakat lokal tetapi juga berkontribusi besar terhadap pasokan pangan nasional. Data produksi padi yang ditampilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) umumnya diukur dalam satuan Gabah Kering Giling (GKG). GKG adalah gabah hasil panen yang telah dikeringkan dengan kadar air sekitar 14% sehingga memenuhi standar untuk digiling menjadi beras. Penggunaan GKG sebagai satuan baku bertujuan untuk menyeragamkan ukuran produksi padi secara nasional sebelum dikonversi menjadi beras konsumsi. Berikut angka produksi padi Jawa Tengah yang ditunjukkan dalam grafik BPS

Gambar 1.6 Grafik GKG Jawa Tengah



Sumber : BPS Jawa Tengah, (2003-2024)

Berdasarkan grafik produksi Gabah Kering Giling (GKG) di Jawa Tengah selama periode 2003–2024, terlihat adanya dinamika produksi yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003, produksi GKG tercatat berada pada kisaran 8,1 juta ton, kemudian mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai puncaknya pada tahun 2015 sebesar 11,3 juta ton, yang merupakan tingkat produksi tertinggi selama periode pengamatan. Setelah periode tersebut, produksi GKG cenderung mengalami penurunan disertai fluktuasi dan berada pada kisaran 9–10 juta ton selama periode 2016–2020. Pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 2021 hingga 2024, produksi terus menunjukkan penurunan ringan, dari 9,7 juta ton pada 2021 menjadi 8,8 juta ton pada 2024. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah sempat mengalami masa produksi padi yang sangat tinggi pada pertengahan dekade 2010, namun menghadapi tren penurunan pada periode terakhir, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan luas tanam, alih fungsi lahan, iklim, dan kondisi lingkungan pertanian.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai pengaruh jumlah pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan pangan terhadap jumlah kemiskinan di Jawa Tengah. Penelitian ini dituangkan dalam kajian yang berjudul *“Pengaruh Jumlah Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketahanan Pangan terhadap Jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.”*

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Jumlah Pengangguran berpengaruh terhadap Jumlah kemiskinan Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh terhadap Jumlah kemiskinan Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Jumlah kemiskinan Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah Ketahanan Pangan berpengaruh terhadap Jumlah kemiskinan Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Ketahanan Pangan terhadap Jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada pengkajian pengaruh jumlah pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan pangan terhadap jumlah kemiskinan di Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data runtun waktu (*time series*) selama periode 2003–2024 dengan pendekatan analisis regresi linier berganda sebagai metode utama dalam menjelaskan hubungan antar variabel penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dari hasil kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pemberian informasi mengenai Pengaruh Jumlah Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan terhadap Jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2003-2024.

2. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi akademik bagi mahasiswa/i UPN Veteran Jawa Timur, khususnya mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan pada bidang kajian yang relevan. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan ilmiah yang bermanfaat bagi pembaca, serta menjadi referensi akademik dalam pengembangan kajian keilmuan yang berkaitan dengan pengaruh jumlah pengangguran, Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK), pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan pangan bagi tingkat jumlah kemiskinan di Jawa Tengah selama periode 2003–2024.